



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	03
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Kesehatan RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 24 Agustus 2016
Pukul	:	10.00 WIB – selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Perkembangan Penanganan Kasus Peredaran Vaksin Palsu;2. Penjelasan dan Laporan Kementerian Kesehatan RI tentang Persiapan dan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 2016;3. Penjelasan Kementerian Kesehatan RI tentang Sistem Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta hasil pengawasannya yang dilakukan sejak tahun 2015 sampai pertengahan Tahun 2016;4. Penjelasan Kementerian Kesehatan RI mengenai langkah nyata atas rekomendasi Panja BPJS Kesehatan dan PBI Komisi IX DPR RI khususnya evaluasi terhadap sistem tarif INA CBG's dan audit investigasi yang dilakukan.
Ketua Rapat	:	H. Syamsul Bachri S, M.Sc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Minarni, SH/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1 DPR/MPR-RI, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 29 orang dari 49 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 2 orang anggota izin;
B. Menteri Kesehatan RI beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 10.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Penanganan vaksin palsu harus dilakukan secara serius karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam penanganannya, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI memperhatikan catatan kritis Komisi IX DPR RI pada Rapat Kerja hari ini, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ulang harus melibatkan orang tua anak yang telah diverifikasi dengan standar yang baku serta memperluas pemeriksaan ini di 9 (sembilan) wilayah yang dideteksi Badan POM RI;
 - b. Mengintensifkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Vaksin Palsu untuk pengungkapan jaringan vaksin palsu di seluruh Indonesia dan meminta Satgas untuk memberikan laporan secara periodik kepada Komisi IX DPR RI setiap bulan sekali sampai berakhirnya masa tugas Satgas;
 - c. Penegakan hukum terhadap pelaku dan seluruh jaringannya dengan menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada sehingga menimbulkan efek jera dari kasus ini; dan
 - d. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan mengkomunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi regulasi terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Fasyankes.
2. Komisi IX DPR RI menyesalkan perubahan atas empat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) karena tidak mengindahkan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan pada tanggal 14 Juli 2016. Berkaitan dengan hal itu, maka Komisi IX DPR RI tidak bertanggungjawab atas revisi tersebut dan meminta Kementerian Kesehatan RI untuk mencabut dan melakukan revisi ulang setelah berkonsultasi dengan Komisi IX DPR RI.
3. Dalam penyelenggaraan kesehatan haji, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk mengintensifkan komunikasi dan

koordinasi dengan Kementerian Agama RI, khususnya mengenai kriteria *istithaah* kesehatan dan peningkatan pelibatan Komisi IX DPR RI dalam pelayanan kesehatan haji selama di Arab Saudi. Selain itu, perlu terobosan penanganan Jama'ah Haji kelompok risiko tinggi termasuk memastikan kecukupan rasio Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan perbekalan kesehatan dengan jumlah Jama'ah Haji.

4. Komisi IX DPR RI memandang bahwa pengawasan alat kesehatan (Alkes) dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) masih sangat lemah. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengoptimalkan kinerja dari Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera menindaklanjuti dengan langkah nyata terhadap rekomendasi Panja BPJS Kesehatan dan PBI Komisi IX DPR RI mengingat rekomendasi ini sudah diserahkan Pimpinan DPR RI ke Pemerintah pada tanggal 20 Mei 2016.
6. Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kesehatan RI untuk terus berjuang agar seluruh Bidan PTT Pusat dapat diangkat menjadi PNS daerah pada tahun ini.
7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada Rapat Kerja hari ini paling lambat tanggal 31 Agustus 2016.

Rapat diakhiri pukul 19.50 WIB

**Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,**



H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc

A-312